

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENDORONG KEIKUTSERTAAN KORUT DALAM OLIMPIADE MUSIM DINGIN PYEONGCHANG 2018

Pada bab ini akan memaparkan faktor-faktor yang mendorong Korut untuk ikutserta dalam Olimpiade Pyeongchang 2018, namun sebelumnya bab ini akan diawali dengan sub bab mengenai gambaran dari keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 dan sub bab tentang analisa kepentingan nasional Korut. Terkait dengan analisa kepentingan nasional Korut, penulis akan menganalisa hanya dari dua unsur saja yaitu *kepentingan pengembangan ekonomi* dan *kepentingan prestise nasional*.

A. Gambaran Keikutsertaan Korut di Olimpiade PyeongChang 2018

Pada pidato kepresidenan Korut dalam penyambutan tahun baru 2018, Kim Jong Un selaku pemimpin tertinggi Korut menyatakan kebersediaan Korut untuk mengirimkan perwakilan dalam Olimpiade Pyongchang. Kemudian pada pertemuan tingkat tinggi antara Korut dan Korsel yang digelar pada 9 Januari 2018 menghasilkan keputusan bahwa Korut dengan pasti akan mengirim kontingen untuk mengikuti Olimpiade Pyongchang 2018. Korut untuk pertama kalinya mengirimkan delegasi dalam jumlah banyak yaitu sekitar 22 atlet, 229 *cheerleaders*, dan 27 pejabat tinggi Korut.

Di ajang Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 terdapat 102 nomor pada 15 cabang olahraga yang melibatkan 2.920 partisipan dari 92 negara. Atlet Korut ikut bertanding dalam tiga cabang olahraga dan lima disiplin. Yang sangat jarang terjadi adalah Dua Korea membentuk tim gabungan untuk mengikuti sebuah

cabang pertandingan dalam olimpiade tersebut, yaitu dalam cabang pertandingan hoki wanita. Korut dan Korsel membuat tim gabungan Korea Bersatu yang melibatkan sebanyak 12 atlet hoki Korut. Keikutsertaan atlet Korut dalam berbagai lomba Olimpiade Pyeongchang akan dijelaskan melalui table berikut:

Tabel 3.1 Lomba yang diikuti Oleh Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018

Tim	Lomba yang diikuti		Perolehan Medali
DPRK	Cabang	Disiplin	0
	Alpine Skiing	Men's Slalom	0
		Ladies' Slalom	0
	Cross Country Skiing	Men's 15 km Free	0
		Ladies' 10 km Free	0
	Figure Skating	Pair Skating	0
	Short Track	Men's 1500 m	0
Korea (tim gabungan Korut & Korse)	Hockey Ice	Women	0

Sumber: <https://www.olympic.org/pyeongchang-2018>

Korut juga mengirimkan atlet di bidang andalan mereka yaitu taekwondo untuk melakukan demonstrasi taekwondo di olimpiade tersebut. Ryom Taek Ok dan Kim Ju Sik adalah pasangan atlet figure skating yang juga berhasil memberikan penampilan yang memukau meskipun tidak mampu membawa pulang gelar juara, namun pasangan atlet tersebut sejak awal isu keikutsertaan Korut telah menjadi sorotan utama diantara seluruh atlet delegasi Korut karena memang kemampuan mereka yang telah diakui secara internasional.

Aksi dari 229 pemandu sorak Korut juga sangat mencuri perhatian dan menjadi delegasi andalan Korut dalam olimpiade tersebut, pasalnya ini adalah kali pertama Korut mengirimkan tim pemandu sorak di ajang olimpiade dalam jumlah banyak dan suatu hal yang baru ketika para pemandu sorak tersebut tidak membawakan lagu puji-pujian untuk sosok pemimpin mereka.

Korut juga sepakat untuk bergabung dengan Korsel dalam parade pembukaan olimpiade di bawah bendera unifikasi Korea. Seluruh atlet yang mengikuti ajang olimpiade tersebut berjalan berdampingan dengan pakaian bernuansa putih sembari mengibarkan bendera unifikasi Korea

Tidak hanya mengikuti lomba dibidang olahraga, melalui olimpiade tersebut Korut sekaligus bersedia untuk berpartisipasi dalam sebuah pertunjukan seni, bersatu dalam bidang seni melalui pertunjukan musik. Pihak Korut mengirimkan lebih dari 140 anggota pemusik ansambel, band ansambel musik klasik Korut yaitu Samjiyon Orkestra, regu penyanyi Korut atau yang biasa disebut dengan “*girlband*” yaitu *Moranbong*, dan Kelompok Orkestra Simfoni Nasional Republik Rakyat Demokratik Korea. Delegasi tersebut datang untuk merayakan Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 pada tanggal 8 Februari, sehari sebelum upacara pembukaan olimpiade yang bertempat di Pusat Kesenian Gangneung. Dalam konser tersebut delegasi seni musik

Korut menampilkan 13 lagu Korsel yang dua diantaranya adalah lagu olahraga yang juga dikenal luas oleh masyarakat Korut.

Kemudian pada 11 Februari 2018 diadakan lagi konser Olimpiade Pyongchang di Teater Haeoreum. Penyanyi Korut bergabung dengan penyanyi asal Korsel yaitu Seohyun yang merupakan salah satu anggota girlband SNSD. Penampilan tersebut diiringi oleh ansambel musik klasik Korut Samjiyon Orkestra.

Dalam keikutsertaanya di Olimpiade Pyeongchang 2018 Korut sama sekali tidak mampu membawa pulang gelar juara dari cabang-cabang lomba yang diikuti. Beberapa atletnya hanya mampu maju hingga ke babak final, seperti atlet Jong Kwang Bom yang hanya berhasil masuk dalam babak final speed skating race jarak pendek 500 meter untuk pria.

Tapi yang perlu kita ingat lagi, hal penting lain yang diharapkan atas keikutsertaan Korut dalam olimpiade ini adalah dapat menjadi langkah awal dari proses perdamaian di Semenanjung Korea.

B. Analisa Kepentingan Nasional Korut

Kepentingan nasional adalah hal utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk kesejahteraan negaranya. Pemenuhan kepentingan nasional ini yang mendorong setiap kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang ada di dunia. Kesadaran akan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan nasional secara mandiri tanpa bantuan dari negara lain, menjadikan kepentingan nasional sebagai pertimbangan utama bagi para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakannya yang berhubungan dengan lingkungan di luar dari teritori negaranya. Apakah dapat memberikan keuntungan bagi negaranya atau justru merugikan negara tersebut. Menurut *Padel Ford* dan *Lincoln*, kepentingan nasional adalah:

*National interest of a country is what a governmental leaders and in large degree also what its people consider at any time to be vital to their national independence, way of life, territorial security and economic welfare.*¹

Dari pengertian di atas dapat dilihat kepentingan nasional tersusun atas 4 kepentingan utama yang menyangkut kesejahteraan negaranya yaitu: 1. *Kepentingan keamanan nasional*; 2. *Kepentingan pengembangan ekonomi*; 3. *Kepentingan peningkatan kekutan nasional*; 4. *Kepentingan prestise nasional*.²

Kepentingan nasional sangat berkaitan dengan arah politik luar negeri sebuah negara. Seperti yang ditunjukkan oleh *Padelford* dan *Lincoln*, politik luar negeri mencakup rancangan tindakan yang digunakan oleh sebuah negara untuk dapat mencapai tujuan nasionalnya yang berada di luar batas kedaulatannya.

Setiap negara dunia memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kondisi dalam negerinya. Mengetahui keadaan dalam negeri suatu negara akan memberikan gambaran mengenai kepentingan nasional yang akan dicapai oleh negara tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penulis hanya akan melihat dari unsur ekonomi dan prestise nasionalnya saja. Dari data-data dan fakta-fakta yang ada, berikut terkait keadaan dalam negeri Korut:

1. Terikat sanksi ekonomi

Korut mulai melakukan pengembangan misil pada tahun 1976 dan melakukan uji coba rudal pertamanya pada tahun 1984. Namun hal tersebut

¹Norman J. Padelford and George A. Lincoln, *International Politics*, The Macmillan Company, New York, 1960, hal. 309

²Norman J. Padelford dan George A. Lincoln, *International Politics*, New York: The Macmillan Company, 1962, hlm. 306

dirasa belum menjadi ancaman. Tercatat sebanyak 101 misil yang telah dilepas oleh Korut sejak uji coba nuklir pada tahun 2006 hingga terakhir kali pada 28 November 2017.

Sejak uji coba nuklir pertamanya pada tahun 2006, Korut dijatuhi sanksi ekonomi internasional oleh DK PBB. Tercatat dari tahun 2006 hingga 2017 terdapat sepuluh resolusi yang telah dibuat oleh PBB terkait sanksi yang diberlakukan terhadap Korut, yaitu Resolusi 1718 pada 2006, Resolusi 1874 pada 2009, Resolusi 1928 pada 2010, Resolusi 1985 pada 2011, Resolusi 2087 dan 2094 pada 2013, Resolusi 2270 dan 2320 pada 2016, Resolusi 2375 pada 2017³.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korut bertujuan untuk memangkas atau mematikan sumber-sumber yang dapat menjadi modal bagi negara tersebut untuk melakukan kegiatan proliferasi dan uji coba senjata nuklirnya. DK PBB (Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa) adalah organisasi internasional yang berhak untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi internasional kepada Korut. Secara garis besar berbagai sanksi ekonomi yang tertuang dalam sanksi internasional yang dijatuhkan kepada Korut berdasarkan berbagai Resolusi PBB adalah sebagai berikut⁴ :

- Financial measures: menghentikan penyediaan layanan keuangan, termasuk uang tunai dan emas, pembukaan anak perusahaan perbankan, penyediaan

³ Nur Afiah Isnaeni, *"Dampak Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Terhadap Hubungan Bilateralnya Dengan Tiongkok Tahun 2013-2015"*, Semarang: Journal of International Relations, 2017, vol. 3, hal. 49-55

⁴ UNSC website, *"1718 Sanctions Committee (DPRK)"*, dikutip 2019, dari <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718.html>.

dukungan keuangan publik, komitmen baru untuk hibah, dan bantuan keuangan atau pinjaman konsensional, serta melarang kegiatan keuangan yang terkait kerjasama dengan bank Korut.

- Coal, Minerals and Sectoral bans: Korut dilarang memasok, menjual, mendistribusikan batubara, besi dan bijih besi, emas, bijih titanium, bijih vanadium, tembaga, nikel, perak, seng dan mineral bumi langka, bijih timbal dan timah, makanan dan produk pertanian, mesin, peralatan listrik, magnesit dan magnesita, kayu dan kapal.
- Larangan mengekspor kondensat (hydrogen cair) dan cairan gas alam
- Ban on all refined petroleum products: Semua Negara Anggota diharuskan untuk melarang pasokan, penjualan atau transfer ke Korut, dari semua produk minyak olahan yang melebihi jumlah keseluruhan 500.000 barel selama periode 12 bulan dimulai pada 1 Januari 2018.
- Restriction on the supply, sell, or transfer of crude oil: Semua Negara Anggota dilarang memasok, menjual, atau mentransfer minyak mentah ke Korut yang melebihi jumlah agregat 4 juta barel atau 525.000 ton per periode 12 bulan dari 22 Desember 2017.
- Seafood ban: Korut dilarang memasok, menjual atau mentransfer, makanan laut (termasuk ikan, krustasea, moluska, dan invertebrata air lainnya dalam segala bentuk).

- Ban on export of textiles from the DPRK: Korut tidak boleh memasok, menjual atau mentransfer, tekstil (termasuk tetapi tidak terbatas pada kain dan produk pakaian setengah jadi atau lengkap).
- Ban on DPRK workers abroad: Semua Negara Anggota dilarang memberikan otorisasi kerja untuk warga negara Korut di yurisdiksi mereka sehubungan dengan admisi di wilayah mereka.
- Luxury goods ban: Semua Negara Anggota diharuskan untuk mencegah pasokan, penjualan atau transfer langsung atau tidak langsung barang-barang mewah ke Korut.

2. Perekonomian tidak stabil

Perekonomian Korut saat ini sedang mengalami ketidak stabilan. Hal ini tentunya karena pengaruh dari sanksi ekonomi yang sedang mengikat Korut hingga saat ini. Berbagai hasil dari kegiatan perekonomian yang menopang pendapatan negara mengalami penurunan. Merosotnya sumber-sumber penghasilan ekonomi Korut karena sanksi ekonomi tersebut, mengakibatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Korut menurun sebesar 3,5 persen di tahun 2017. Bahkan penyusutan tersebut adalah yang paling rendah sejak musibah kelaparan Korut pada tahun 1997. Berikut adalah tabel pertumbuhan PDB Korut yang tertera pada halaman selanjutnya:

Tabel 3.2 Pertumbuhan PDB Korea Utara

(percentage change over previous year)											
'90	'95	'00	'05	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
-4.3	-4.4	0.4	3.8	-0.5	0.8	1.3	1.1	1.0	-1.1	3.9	-3.5
(9.8)	(9.6)	(8.9)	(3.9)	(6.5)	(3.7)	(2.3)	(2.9)	(3.3)	(2.8)	(2.9)	(3.1)

Note: Figures in parentheses represent South Korea's GDP growth rates, based on 2010 prices.

Sumber: Kang Chung Ku, Press Release: *Gross Domestic Products Estimates*for North Korea in 2017*. The Bank of Korea, 2017

Meskipun Korut tidak pernah mempublikasikan terkait perekonomiannya, namun data-data di atas merupakan hasil analisis serta estimasi dari Bank Sentral Korea Selatan yang memang rutin setiap tahunnya mengeluarkan laporan estimasi perekonomian dari negara tetangganya tersebut sejak tahun 1991 menggunakan data berdasarkan suplai kuantitas produksi oleh institusi yang relevan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Korut adalah negara yang sangat tertutup, begitu terisolasi dari dunia luar mengenai berbagai informasi dari dalam negaranya.

Hampir seluruh sektor dari kegiatan perekonomian Korut menjadi sasaran dari sanksi ekonomi internasional yang sedang menjerat Korut, sehingga hasil dari kegiatan sektor ekonomi tersebut mengalami penurunan. Misalnya seperti produksi industri Korut menurun 8,5 persen, hasil produksi dari sektor pertanian dan industri konstruksi juga ikut menyusut sebesar 1,3 persen dan 4,4 persen. Berikut adalah rincian tabel terkait penurunan hasil kegiatan ekonomi Korut:

Tabel 3.3 PDB Korea Utara, berdasarkan Aktivitas Ekonomi

(KRW billion, %)

	Real		Rate of change	Nominal		Share (2017)
	2016	2017		2016	2017	
Agriculture, forestry & fishing	7,144.1	7,049.4	-1.3	7,832.6	8,304.5	22.8
Mining, manufacturing	11,428.7	10,462.0	-8.5	11,980.1	11,573.2	31.8
Mining	4,790.4	4,265.5	-11.0	4,547.4	4,271.4	11.7
Manufacturing	6,657.9	6,196.6	-6.9	7,432.7	7,301.8	20.1
Electricity, gas & water supply	1,192.5	1,157.3	-2.9	1,874.5	1,836.5	5.0
Construction	2,608.7	2,494.0	-4.4	3,194.7	3,146.8	8.6
Services	9,561.6	9,608.8	0.5	11,221.4	11,520.7	31.7
Government	6,904.4	6,958.4	0.8	8,098.4	8,446.8	23.2
Other services	2,657.1	2,650.3	-0.3	3,122.9	3,074.0	8.4
Wholesale & retail trade and restaurants & accommodation	127.5	125.8	-1.3	134.7	136.0	0.4
Transportation & communication	762.8	730.9	-4.2	915.4	838.2	2.3
Finance & insurance, real estate	1,767.9	1,795.3	1.5	2,072.8	2,099.8	5.8
GDP	31,996.6	30,882.3	-3.5	36,103.3	36,381.8	100.0

Sumber: Kang Chung Ku, Press Realese: *Gross Domestic Products Estimates*for North Korea in 2017*. The Bank of Korea, 2017

3. Citra buruk

Sejak uji coba senjata nuklir Korut pada tahun 2006, dunia mulai risau. Sebelumnya, ketika tahun 2002 Presiden AS Georg W Bush menempatkan

Korut sebagai salah satu negara yang berada dalam “poros kejahatan” seperti Irak dan Iran atas program senjata yang dimiliki Korut. Pada tahun 2005 Korut resmi mengumumkan atas kepemilikan senjata nuklir. Pada tahun selanjutnya Korut pun melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya yang kemudian mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Hal tersebut dianggap dapat mengancam dan mengganggu keamanan internasional. Pasalnya Korut ketika itu mulai melakukan uji coba nuklir jarak jauh yang diklaim mampu menyerang wilayah AS, yaitu sekitar 15.000 km. Hal ini mulai menjadi perhatian DK PBB, dan menjatuhkan sanksi pertama kepada Korut.

Negara-negara dunia ikut resah dengan keberadaan senjata nuklir Korut, karena Korut kerap melakukan uji coba senjata nuklir sejak tahun pertama uji coba tersebut. Bahkan Korut terakhir kali melakukan uji coba senjata nuklirnya pada 28 November 2017.

Negara-negara anggota ikut memberlakukan sanksi yang dibuat oleh DK PBB untuk memberikan efek jera pada Korut. Karena rasa percaya diri atas kepemilikan senjata nuklirnya, Korut kerap bersikap agresif serta cenderung menggunakan *hard power*, misalnya dalam menangani masalahnya dengan Korsel di Semenanjung Korea sehingga terus menimbulkan ketegangan di antara keduanya.

Selain itu dalam berhadapan dengan negara-negara yang menjadi rival sejatinya seperti AS Korut selalu mengancam akan melakukan penyerangan dengan senjata nuklir miliknya. Hal ini membuat Korut di mata dunia dapat menjadi pemicu perang dunia tiga. Ini membuat Korut mendapatkan image negatif dari dunia internasional. Ditahun 2017 ini, sanksi terhadap Korut bahkan semakin diperketat mengingat uji coba nuklir terakhir kali yang

dilakukannya pada tahun tersebut. Ini membuktikan semakin ketatnya sanksi tersebut berarti semakin khawatir dunia internasional terhadap pergerakan Korut dan rasa ketidakpercayaan masyarakat internasional terhadap Korut semakin tinggi, citra Korut semakin buruk di mata dunia.

Karena penggunaan senjata nuklir Korut dan kerap bertindak agresif, pada tahun 2007, menurut hasil survey dari BBC World Service bahwa Korut menduduki ranking ke empat sebagai negara yang memiliki “negative image” sebesar 48 persen. Kemudian di tahun 2012, berdasarkan survey yang juga digelar oleh BBC dan bekerjasama dengan GlobeScan Poll dan Universitas Maryland Amerika Serikat bahwa Korut masih menduduki peringkat ke empat di bawah Israel sebagai negara dengan citra buruk.

Dari keadaan atau kondisi Korut yang telah dipaparkan di atas, dapat kita lihat bahwa Korut saat ini tentunya mengedepankan kepentingan ekonomi untuk menstabilkan perekonomiannya yang merosot akibat dari sanksi ekonomi yang menjerat negaranya.

Dari segi prestise nasional, Korut mendapat banyak pandangan buruk dari dunia internasional mengenai negaranya atas kecenderungannya menggunakan hard power yang dapat mengancam keamanan dunia internasional. Sehingga penting bagi Korut untuk melakukan perbaikan citra tersebut.

C. Faktor-faktor Pendorong Keikutsertaan Korut

Keputusan Korut untuk ikutserta dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018, bukanlah suatu keputusan tanpa maksud dan tujuan, tentunya bagi Korut. Kondisi internal maupun eksternal Korut yang mendorong Korut untuk mengambil keputusan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa keikutsertaan Korut dalam berbagai olimpiade olahraga sudah banyak dilakukan oleh Korut, namun ini adalah yang pertama kalinya untuk keikutsertaannya pada olimpiade yang digelar di Korsel.

Pada sub bab ini akan menjelaskan hal-hal atau faktor-faktor pendorong Korut untuk ikutserta dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 yang hanya dilihat dari kebutuhan ekonomi dan politik (terkait dengan prestise nasional). Berikut faktor-faktor yang mendorong keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 :

1. Dukungan dalam birokrasi Korut

Di negara yang selalu mendapat *stereotype* sebagai penganut *Stalinist* tersebut, setiap proses pengambilan keputusan secara penuh dipengaruhi oleh birokrasi. Masyarakat Korut sendiri tidak pernah berkesempatan untuk terlibat dalam setiap urusan politik di negara tersebut. Masyarakat hanya menjalani hidup mereka dan patuh pada setiap peraturan yang diberlakukan oleh rezim.

Kim Jong Un sebagai pemimpin tertinggi Korut memiliki hak penuh untuk mengambil segala tindakan dan memutuskan berbagai kebijakan terkait negaranya melalui PBK yang menjadi pendukung dari seluruh kebijakan yang diambil dan yang akan memberikan berbagai pengaruh serta masukan dalam proses pengambilan kebijakan. Partai Buruh Korea adalah satu-satunya partai dalam birokrasi Korut, yang merupakan pendukung dan penguat rezim yang memerintah Korut. Walaupun ada partai lain yang ada di Korut, namun partai tersebut merupakan partai yang menjadi mitra partai yang berkuasa, bukan menjadai partai oposisi dari pemerintah.

Bagian tertinggi dalam pembuatan kebijakan Korut berasal dari Komite Sentral Partai Buruh Korea dan tiga lembaga bawahannya yaitu Biro Politik atau

Politbiro, Komisi Kontrol, dan Biro Kebijakan Eksekutif, yang juga mengontrol pengawasan dan menunjuk anggota partai, kabinet, dan militer.

Departemen Bimbingan Organisasi Komite Sentral (OGD) dan Departemen Propaganda dan Agitasi adalah badan partai yang sangat berpengaruh. Sentral Komite terdiri dari sekitar dua puluh departemen. Departemen pemerintahan mengajukan rancangan kebijakan kepada masing-masing entitas Komite Sentral partai. Komite Sentral yang kemudian mempertimbangkan, mengubah, dan menyetujui inisiatif tersebut. Proses ini sebagai cara partai untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin Korut telah melakukan konsultasi dengan orang-orang dekatnya dalam pemerintahan, terutama aktor-aktor yang memiliki posisi penting dalam partai.

Terkait keputusan Kim Jong Un untuk ikut berpartisipasi dalam Olimpiade Pyeongchang 2018 tentunya tidak terlepas dari masukan dan pengaruh orang-orang terpercaya yang memegang posisi penting dalam pemerintahannya, yang secara formal telah melalui proses pengambilan keputusan dalam birokrasi yang dikontrol oleh PBK. Masyarakat, interest group, maupun media di Korut tidak memiliki peran sebagai pihak yang memberikan input dalam proses pengambilan keputusan, semuanya berada di bawah pengawasan PBK. Masyarakat harus menerima dan patuh pada setiap peraturan dan keputusan pemimpin tertinggi negara, bahkan media massa hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan propaganda terutama untuk menumbuhkan dan menanamkan rasa kebanggaan dan kecintaan masyarakat Korut pada negara dan pemimpinnya.

Beberapa aktor-aktor terpercaya yang berpengaruh terkait dengan keikutsertaan Korut di Olimpiade Pyeongchang 2018 diantaranya adalah

Ketua Komite Reunifikasi Damai Negara yaitu Ri Son Gwon, yang menjadi tokoh penting dalam perundingan yang diadakan antara Korut dan Korsel terkait keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Pyeongchang 2018. Dalam pertemuan yang diadakan di bulan Januari 2018 tersebut ia secara langsung menyatakan harapannya agar keikutsertaan Korut tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea dan dapat menjadi hadiah terbaik di awal tahun 2018.

Ada pula Choe Hwi yang merupakan Menteri Olahraga dan tokoh kebudayaan Korut. Sesuai posisi yang didudukinya sebagai Menteri Olahraga, Choe Hwi menjadi salah satu penginisiasi terobosan baru mengenai hubungan Korut dengan Korsel melalui keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018. Aktor-aktor ini pun kemudian ditunjuk sebagai delegasi pejabat tinggi Korut untuk menghadiri pembukaan Olimpiade Pyeongchang 2018 bersama 25 orang pejabat lainnya.

Keputusan Korut untuk ikutserta dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 secara langsung diumumkan dan diutarakan oleh pemimpin tertinggi Korut Kim Jong Un pada pidato kepresidenannya menyambut tahun baru 2018. Presiden Kim mengumumkan bahwa Korut akan mengikuti Olimpiade Musim Dingin 2018 yang diselenggarakan di Korsel, dan bersedia untuk mengirimkan kontingennya.

2. *Image Building*

Penting bagi suatu negara untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestise negaranya. Image yang baik dan positif suatu negara akan mempermudah negara untuk bergaul serta dapat diterima di dunia internasional dan dapat menjadi *bargaining position* bagi negara tersebut. Setiap

tindakan dan kebijakan yang diambil oleh suatu negara akan merefleksikan seperti apa negara tersebut.

Sejak uji coba senjata nuklir pertama Korut pada tahun 2006, negara tersebut menjadi perhatian dunia internasional. Masyarakat internasional mengkhawatirkan kegiatan uji coba senjata nuklir Korut dapat mengancam keamanan dan stabilitas dunia internasional.

Keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyongchang 2018 adalah sebagai momentum untuk memperbaiki dan meningkatkan prestise negaranya di dunia internasional, yang mana melalui keikutsertaannya dalam olimpiade ini secara tidak langsung akan memberikan citra baik atau pandangan positif terhadap Korut yang selama ini selalu dianggap sangat agresif dan cenderung menggunakan *hard power*. Hal ini juga telah disampaikan langsung oleh Presiden Kim Jong Un dalam pidato kepresidennya di awal tahun 2018 bahwa Olimpiade Musim Dingin yang akan diselenggarakan di Korsel ini dapat memberikan peluang yang tepat bagi Korut untuk mendemonstrasikan prestise nasional mereka.

Tujuan utama Gerakan Olimpiade ini agar para anggota dapat berkontribusi untuk membangun dunia yang damai dan lebih baik dengan mengedukasi pemuda-pemudi melalui olahraga yang kemudian dipraktekkan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun serta dalam semangat Olimpiade⁵. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan adanya rasa saling pengertian dengan semangat persahabatan, solidaritas, dan *fair play*⁶. Melalui ini kegiatan ajang

⁵ The Editor of Internasional Olympic Committee, "*Promote Olympism in Society*", Internasional Olympic Committee, dikutip dari <https://www.olympic.org.html>, pada 14 Oktober 2018

⁶ *Ibid.*

olahraga diformulasikan dengan edukasi dan kebudayaan.

Terkait hal di atas secara tidak langsung keikutsertaan Korut dalam Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang 2018 membentuk citra Korut bahwa negara yang cenderung agresif dan selalu menggunakan *hard power* tersebut, di sisi lain juga Korut ikut untuk berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian melalui gelaran olimpiade olahraga, karena nilai-nilai maupun tujuan yang tertanam dalam Gerakan Olimpiade tersebut akan diterapkan oleh seluruh partisipan dan tidak terkecuali Korut. Dengan keikutsertaan Korut dalam olimpiade tersebut dapat meningkatkan pula profil gelaran olimpiade tersebut sebagai olimpiade perdamaian seperti yang diutarakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Korsel, Kang Kyung-Wha.

Banyak negara-negara dunia mengungkapkan harapan agar keputusan Korut dalam mengikuti olimpiade tersebut adalah sebuah pertanda ajakan perdamaian di Semenanjung Korea. Menlu Korsel juga mengungkapkan harapannya agar keikutsertaan Korut dalam ajang olimpiade ini dapat menjadi momentum rekonsiliasi antar Dua Korea. Dunia internasional memberikan banyak tanggapan dan harapan yang positif serta dukungan atas keikutsertaan Korut tersebut. Keputusan tersebut tentunya langsung disambut baik oleh pemimpin Korsel, Presiden Moon Jae-In.

3. Mendapat Peluang kerjasama dengan Korsel

Akibat uji coba nuklir yang dilakukan Korut sejak tahun 2006, berbagai sanksi internasional dijatuhkan kepada Korut yang tertuang dalam resolusi DK PBB. Sanksi ekonomi adalah salah satu sanksi terberat yang dijatuhkan kepada negara tersebut. Akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan padanya, PDB Korut pada tahun 2017 menurun sebesar 3,5 persen

dari tahun 2016. Sanksi semakin diperketat sehubungan dengan uji coba nuklir Korut terakhir kali pada tahun 2017.

Keikutsertaannya dalam Olimpiade Pyongchang 2018 ini memberikan awalan yang baik bagi Korut. Langkah yang diambil oleh Korut untuk ikutserta dalam olimpiade tersebut setidaknya mampu membangun kembali kepercayaan antar Kedua Korea terutama Korsel terhadap Korut sehingga secara tidak langsung membuka kembali pintu kerjasama bagi Korut dengan Korsel. Kedua Korea mulai mengarah pada kerjasama ekonomi, yang mana hal ini tentunya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak terutama bagi Korut yang kondisi ekonominya kini kian mengalami ketidak stabilan akibat sanksi ekonomi yang masih menjerat dan bahkan semakin diperketat terkait kegiatan uji coba nuklir pada tahun 2017.

Seperti pada pertemuan tingkat tinggi pemimpin Kedua Korea pada 19 September 2018 yang menyepakati untuk segera menormalisasikan kompleks Industri Gaesong yang sebelumnya ditutup pada tahun 2013 karena makin meningkatnya ketegangan antara Korut dan Korsel. Kawasan industri Gaesong ini merupakan bidang yang sangat penting untuk pemasukan bagi Dua Korea. Setiap tahunnya kawasan industri ini mampu menghasilkan hampir sekitar US\$ 2 juta untuk perdagangan lintas batas. Sekitar 123 perusahaan Korsel di kawasan industri tersebut mempekerjakan sekitar 53.000 pekerja Korut.

Selain itu adanya pembicaraan kembali mengenai normalisasi proyek pariwisata bersama

Gunung Kumgang⁷ yang juga ditutup pada tahun 2008 karena adanya penembakan pada turis asal Korsel di kawasan pariwisata tersebut.

Kerjasama ekonomi tersebut setidaknya dapat menjadi angin segar bagi pihak Korut yang kini sangat membutuhkan modal dan pasokan untuk memulihkan kembali perekonomiannya.

Selain kesepakatan untuk menurunkan ketegangan militer diantara keduanya, antarKorea juga akan memfokuskan untuk melakukan kerjasama dalam bidang kemanusiaan dan meningkatkan pertukaran olahraga⁸. Sejumlah rencana kerjasama juga telah dibahas pada 26-28 Juni 2018 yaitu di sektor kereta api, jalan, dan kehutanan⁹. Kerjasama pembangunan di sektor kereta api ini bertujuan untuk menghubungkan dan menghidupkan kembali jalur distribusi untuk kegiatan perekonomian yang menghubungkan Dua Korea dengan negara-negara lain di Asia Timur dan Eropa.

⁷ MAJW, "Hasil Pertemuan Korea Utara & Korea Selatan: Sepakati Era Tanpa Perang" Retrieved Oktober 2018, from IDN Times: <https://www.idntimes.com.html>

⁸ Eka Yudha Saputra, "Korea Utara - Korea Selatan akan Bahas Kerjasama Perkeretaapian" Retrieved Oktober 2018, from TEMPO.CO: <https://dunia.tempo.co.html>

⁹ *Ibid.*